



SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

RENCANA KERJA

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM

2023
2024



Tim Pembangunan Zona Integritas Sekretariat Lembaga Sensor Film

Pengarah	M. Sanggupri
Penanggungjawab	Abu Chanifah
Ketua Tim	Ridwan Fahrudin
Sekretaris	Mahdi Shiddieqy S.
Koordinator Area I Manajemen Perubahan	Putri Arimbi Siregar
Koordinator Area II Penataan Tata Laksana	Sofyan Hadi
Koordinator Area III Penataan Sistem Manajemen SDM	Desti Nurmatyas
Koordinator Area IV Penguatan Akuntabilitas	Hadi Prabowo
Koordinator Area V Penguatan Pengawasan	M. Nurhasim
Koordinator Area VI Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Intan Rukma Isriana
Anggota Area I	Suprayitno
Anggota Area II	Yekti Aisyah
Anggota Area III	Novianty
Anggota Area IV	Octaviana Atiek Sulistyani
Anggota Area V	Rudy Legowardoyo
Anggota Area VI	Akbar Arief Darmawan

Kata Pengantar

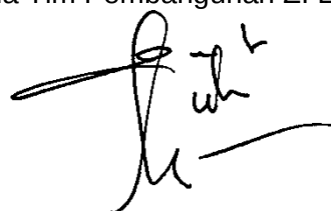
Dalam mengemban tugas mulia untuk melindungi masyarakat dari paparan tayangan dan tontonan film yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa, Lembaga Sensor Film (LSF) sebagai satu-satunya lembaga negara yang menyelenggarakan pelayanan penyensoran film dan iklan film di negeri ini terus berupaya melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelayanan publik sebaik mungkin kepada seluruh penerima layanan. Pelayanan publik berupa layanan penyensoran film dan iklan film terus kami bangun, sesuaikan, dan implementasikan sesuai arah reformasi birokrasi yang ditetapkan Presiden melalui regulasi-regulasi di bidang pelayanan publik dan reformasi birokrasi yang berlaku.

Salah satu langkah percepatan Reformasi Birokrasi yang saat ini ditetapkan pemerintah adalah Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Sehubungan dengan hal tersebut pada tahun 2023 ini LSF memulai pembangunan Zona Integritas (ZI) dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif dan efisien, serta pelayanan publik yang berkualitas di lingkungan Sekretariat Lembaga Sensor Film.

Dalam menentukan rencana dan target yang relevan dengan tujuan Pembangunan Zona Integritas perlu disusun dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Sekretariat Lembaga Sensor Film. Selanjutnya, dokumen ini akan dijadikan acuan dan referensi tim pembangunan zona integritas dalam menjalankan rencana aksi sesuai dengan target dan jadwal yang telah disusun bersama.

Ucapan terima kasih kepada seluruh pihak atas tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Sekretariat Lembaga Sensor Film menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Kami mohon doa serta dukungan agar seluruh upaya yang kami lakukan dalam membangun Zona Integritas dapat terlaksana dan tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, serta terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif dan efisien, serta pelayanan publik yang berkualitas di lingkungan Sekretariat Lembaga Sensor Film.

Jakarta, Hari Film Nasional, 30 Maret 2023
Ketua Tim Pembangunan ZI LSF



Ridwan Fahrudin, S.T., M.T.

Daftar Isi

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
A. LATAR BELAKANG	4
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	5
C. DASAR HUKUM	5
D. RUANG LINGKUP	6
E. PENGERTIAN UMUM	6
F. PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS	8
G. TABEL RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZI	9
H. MONITORING DAN EVALUASI	22
PENUTUP	10



BAB I Pendahuluan



Latar Belakang

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan professional untuk mewujudkan *good governance* dan *clean government* menuju aparatur sipil negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta meningkatnya pelayanan prima juga kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Saat ini Reformasi Birokrasi telah masuk kepada periode ketiga atau terakhir dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional. Pada tahap akhir ini, Reformasi Birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran tersebut, maka perlu dilaksanakan secara kongkret program reformasi birokrasi pada unit kerja instansi pemerintah melalui upaya pembangunan Zona Integritas di lingkungan Sekretariat Lembaga Sensor Film. Sekretariat Lembaga Sensor Film (LSF) merupakan lembaga negara bertugas melakukan penelitian dan penilaian terhadap judul, tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan suatu film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum dalam rangka melindungi masyarakat dari dampak negatif film dan iklan film.

Layanan utama yang diselenggarakan oleh Sekretariat Lembaga Sensor Film kepada publik adalah layanan penyensoran Film dan Iklan Film. Dalam rangka memberikan pelayanan publik yang baik, berkualitas dan prima sesuai dengan indikator-indikator yang diatur di dalam pedoman pembangunan Zona Integritas serta dalam rangka menciptakan birokrasi yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif dan efisien

Sekretariat Lembaga Sensor Film menimbang perlu membangun Zona Integritas dan melakukan pemenuhan terhadap seluruh penilaian yang ada di dalam enam (6) area perubahan pembangunan Zona Integritas.

Maksud & Tujuan

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Sekretariat Lembaga Sensor Film ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Tim Pembangunan Zona Integritas Sekretariat Lembaga Sensor Film dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan tujuan memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Dasar Hukum

Dasar Hukum Pembangunan Zona Integritas Sekretariat Lembaga Sensor Film adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film;
4. Permen PAN & RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film;

7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 166/O/2021 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas Sekretariat Lembaga Sensor Film;
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2022 Pengusulan Unit Kerja Dalam Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Ruang Lingkup

Ruang lingkup dokumen ini berisi program kerja dan rencana aksi pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Sekretariat Lembaga Sensor Film.

Pengertian Umum

1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
4. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
5. Unit Kerja adalah Unit/satuan Kerja di instansi Pemerintah, serendah-rendahnya eselon III yang menyelenggarakan fungsi pelayanan.
6. Tim Penilai Internal (TPI) adalah tim penilai dan pemeriksa yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM.



BAB II Tahapan Pembangunan Zona Integritas

Pencanangan Zona Integritas

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas adalah *stepping stone* atau batu pijakan pertama yang menandakan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Sekretariat Lembaga Sensor Film dilakukan. Pencanangan Zona Integritas dilaksanakan dalam beberapa tahap yaitu:

1. Deklarasi/ Pernyataan dari Sekretaris LSF yang bertanggungjawab untuk urusan administrasi dan teknis bahwa instansi LSF telah siap membangun Zona Integritas.
2. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh Sekretaris LSF dan seluruh pegawainya dengan menandatangani Dokumen Pakta Integritas Pembangunan Zona Integritas.
3. Pencanangan pembangunan Zona Integritas dilanjutkan dengan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan perfilman baik pelaku usaha maupun penggiat perfilman yang dilaksanakan dalam sebuah momen besar penandatanganan komitmen bersama secara terbuka yang dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak yang terlibat dalam pemberian layanan dan penerima layanan dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan pembangunan zona integritas.

Pembangunan Zona Integritas

Proses pembangunan Zona Integritas dilakukan dalam 6 area perubahan yang mencakup Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Masing-masing 6 area perubahan tersebut dibangun dalam dua aspek yaitu aspek pemenuhan & reform.

Breakdown rencana pembangunan Zona Integritas dalam 6 area perubahan tersebut kami sajikan dalam tabel rencana pembangunan Zona Integritas Sekretariat Lembaga Sensor Film.

Bab III Matriks Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas



**TABEL RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM
TAHUN PEMBANGUNAN 2023-2024**

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Bab IV Program Prioritas



Program Prioritas

Program-program prioritas pembangunan Zona Integritas di lingkungan Sekretariat Lembaga Sensor Film dalam 6 area perubahan sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan

Program-program dalam Area Manajemen Perubahan yang menjadi prioritas dalam pembangunan ZI Sekretariat LSF adalah:

- Penetapan Agen Perubahan dan Inovasi Perubahan
- Internalisasi *Core Value* dan Budaya Kerja PRIMA
- Monitoring dan Evaluasi Berkala Pembangunan ZI

2. Penataan Tata Laksana

Program dalam Area Penataan Tata Laksana yang menjadi prioritas dalam pembangunan ZI Sekretariat LSF adalah:

- Reviu POS berkala
- Penilaian SPBE Sekretariat Lembaga Sensor Film sebagai penilaian indikator transformasi digital instansi pemerintah

3. Penataan Manajemen SDM

Program dalam Area Penataan Manajemen SDM yang menjadi prioritas dalam pembangunan ZI Sekretariat LSF adalah:

- Rotasi untuk proses peningkatan/penunjang kinerja pegawai
- Pemberian *reward and punishment* bagi pegawai berprestasi

4. Penguatan Akuntabilitas

Program dalam Area Penguatan Akuntabilitas yang menjadi prioritas dalam pembangunan ZI Sekretariat LSF adalah:

- Nilai SAKIP Sekretariat LSF naik
- Tindaklanjut terhadap capaian target kinerja yang kurang

5. Penguatan Pengawasan

Program dalam Area Penguatan Pengawasan yang menjadi prioritas dalam pembangunan ZI Sekretariat LSF adalah:

- Sosialisasi Anti Gratifikasi
- Pembangunan Lingkungan Pengendalian di lingkungan Sekretariat LSF

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Program-program dalam Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang menjadi prioritas dalam pembangunan ZI Sekretariat LSF adalah:

- SKM dan tindaklanjut hasil SKM
- *Benchmarking* pada unit layanan teknis dengan penilaian yang baik sebagai pembandingan penyelenggara pelayanan publik
- Inovasi layanan publik
- Pengembangan aplikasi e-SiAS
- Peningkatan

Seluruh program-program prioritas dalam masing-masing area dimonitoring dan dievaluasi bersama dengan seluruh aksi/program pembangunan Zona Integritas yang tertuang di dalam matriks rencana aksi pembangunan Zona Integritas Sekretariat Lembaga Sensor Film.

Bab V Monitoring dan Evaluasi



Monitoring & Evaluasi

Monitoring merupakan rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk memantau pelaksanaan kebijakan dan program yang sedang berjalan, baik menyangkut perencanaan, pelaksanaan, dan hambatannya, termasuk pemecahan masalah yang dapat dilakukan guna menyelesaikan hambatan yang ada. Monitoring juga merupakan bagian dari sistem tata kelola yang dilakukan oleh Sekretariat Lembaga Sensor Film, guna menjaga dan memastikan pelayanan Penyensoran Film dan Iklan Film dilaksanakan sesuai standar serta memastikan implementasi kebijakan dan program Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

Monitoring dan evaluasi rencana kerja pembangunan zona integritas Sekretariat Lembaga Sensor Film membutuhkan data dan informasi sebagai bahan penilaian terhadap proses implementasi rencana dan kebijakan pembangunan Zona Integritas. Data dan informasi tersebut dapat diperoleh melalui metode dokumentasi yang dilakukan melalui berbagai laporan, seperti laporan tahunan, semesteran, triwulan, bulanan yang dikoordinasikan dan dikelola oleh Koordinator di masing-masing dari 6 area perubahan dan Tim Kerja teknis di Sekretariat Lembaga Sensor Film.

Mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan dan implementasi rencana kerja pembangunan zona integritas Sekretariat Lembaga Sensor Film dilakukan setiap 6 bulan sekali oleh asessor ZI dari Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek. Dalam prosesnya melibatkan berbagai unsur baik penerima layanan (pelaku usaha dan penggiat perfilman), seluruh unsur pimpinan, pengelola pengaduan masyarakat, tim Agen Perubahan, pengelola *Whistleblowing system* di Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek, serta stakeholder lainnya. Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas memegang fungsi utama dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh unit tim area perubahan organisasi berkoordinasi dengan pimpinan unit kerja.

Penutup

Pembangunan Zona Integritas di Sekretariat Lembaga Sensor Film adalah salah satu upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan secara konkret oleh segenap pimpinan, jajaran dan seluruh pegawai LSF. Pengembangan WBK dan WBBM secara bertahap diharapkan akan memberikan kontribusi yang dapat meningkatkan nilai IPK PPATK.

Rencana Kerja ini bersifat dinamis, dimana ketentuan-ketentuan di dalamnya dapat diubah sesuai kebutuhan yang memuat indikator dalam rangka penetapan predikat menuju WBK dan WBBM yang diyakini semakin mengarah kepada *zero tolerance approach* dalam pemberantasan korupsi.

Membutuhkan **4K (kerja keras, komitmen, keyakinan dan kebersamaan)** untuk menjadikan Sekretariat Lembaga Sensor Film tetap bersih dari korupsi dan dalam melaksanakan birokrasi *good governance*.

Dengan disusunnya Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Sekretariat Lembaga Sensor Film ini, diharapkan Tim Pembangunan ZI dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan lebih baik dan terarah, sehingga dapat mewujudkan target dan visi yang telah ditetapkan, serta mendorong tercapainya penerapan *good governance* untuk mengemban tugas utama Sekretariat Lembaga Sensor Film dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif paparan tayangan dan tontonan film yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Mohon doa dan dukungan dari seluruh pihak untuk mensukseskan pembangunan Zona Integritas Sekretariat Lembaga Sensor Film.

Terima kasih.





SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI